



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHFUDZ
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 137635

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.375.000.000

1. Tanah Seluas 3057 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN
Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/140 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 221.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2009,
HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA CB150R SEPEDA MOTOR KOPLING Tahun
2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
3. MOBIL, HONDA CR-V MOBIL MATIC Tahun 2014, LAINNYA Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 74.882.677

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.771.382.677

III. HUTANG Rp. 140.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.631.382.677

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.